

Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Wahyudi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk memfokuskan optimalisasi anggaran pada belanja urusan wajib (mandatory spending) dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, dan secara terus menerus untuk meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, dengan memperhatikan efek stimulusnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

JEL: I30

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Menurut Sukirno (2013), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka panjang. Tiga komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2015), yakni: (1) akumulasi modal; (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi.

Perekonomian nasional selama ini menunjukkan *trend* pertumbuhan positif. Tahun 2016, perekonomian nasional tumbuh 5,03 %, meningkat menjadi 5,07 % pada tahun 2017, dan tahun 2018 5,17 %. Berbeda dengan kondisi nasional, dalam dua tahun terakhir (2017-2018) beberapa provinsi mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat 16 provinsi yang pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan, dan hanya 10 provinsi yang peningkatan pertumbuhan ekonominya melampaui nasional. Daerah yang peningkatan pertumbuhan ekonominya paling tinggi adalah Papua (2,69 %).

Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban terhadap berbagai persoalan kesejahteraan, namun menjadi syarat keharusan dan kecukupan (*necessary and sufficient*

* Email: awankyudi@yahoo.com

condition) dalam mengurangi kemiskinan. Pengalaman di beberapa negara, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan, diantaranya jumlah penduduk miskin yang relatif besar (Berarzi dan Marzo, 2015).

Data statistik menunjukkan, persentase penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan pada tahun 2015-2018. Penurunan penduduk miskin secara bertahap juga terjadi di beberapa provinsi. Namun masih cukup banyak daerah yang persentase penduduk miskinnya di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2018, diantara 16 provinsi yang persentase penduduk miskinnya sangat tinggi adalah Papua (27,43 %); Papua Barat (22,66 %); Nusa Tenggara Timur (21,03 %); Maluku (17,85 %), Gorontalo (15,83 %), dan Bengkulu (15,41 %).

Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014; Sukirno, 2013).

Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam rangka mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018), peningkatan pengeluaran pemerintah provinsi yang sangat tinggi terjadi di DKI Jakarta (Rp 8,01 Trilyun/tahun); Jawa Timur (Rp 2,30 Trilyun/tahun), Jawa Barat (Rp 2,11 Trilyun/tahun), Jawa Tengah (Rp 1,88 Trilyun/tahun), Sulawesi Selatan (Rp 897,69 Milyar/tahun), dan Papua (Rp 707,76 Milyar /tahun).

Dilihat dari sasarannya, secara umum pengeluaran pemerintah dibagi dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, pengeluaran pemerintah yang secara langsung memberi kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sasaran ini dapat diwujudkan melalui pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor ini menyangkut kebutuhan dasar manusia. *Kedua*, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan sasaran ini, pengeluaran pemerintah biasanya dialokasikan untuk membenahi infrastruktur karena seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan kondisi objektif yang dipaparkan di atas, dan mengingat bahwa pengeluaran pemerintah provinsi merupakan instrumen fiskal/kebijakan anggaran yang sangat efektif dalam menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka penelitian tentang pengeluaran pemerintah provinsi dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi relevan untuk dilakukan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap

penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta. Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pengeluaran pemerintah/investasi pemerintah secara langsung di berbagai bidang. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Selain untuk pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengeluaran pemerintah juga secara khusus ditujukan dalam upaya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Misalnya pengeluaran pemerintah untuk pertanian, pembangunan industri, pengembangan kegiatan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk pengembangan sektor ekonomi potensial, maka pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar yang memadai.

Penyediaan infrastruktur menjadi syarat utama bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat menambah kapasitas produksi dan memberikan efek multiplier dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan membuka daerah-daerah yang terisolasi, mengurangi biaya produksi, mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru seperti industri dan pasar, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya beli konsumen.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi, menurut Kuznet (Arsyad, 2010) adalah kenaikan kapasitas produksi dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas produksi ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi.

Teori pertumbuhan ekonomi lainnya dikemukakan oleh Keynes (Sukirno: 2013). Dasar pemikiran Keynes bertitik tolak pada pandangan klasik, yang beranggapan bahwa tanpa campur tangan pemerintah maka pembangunan ekonomi akan berjalan maksimal. Kenyataannya, pada tahun 1930-an terjadi pengangguran besar-besaran. Teori Keynes menggunakan pendekatan dari segi makro untuk mengatasi terjadinya pengangguran. Untuk mengatasi pengangguran, menurut Keynes perlu menambah pengeluaran supaya pengusaha menaikkan investasi yang akan menaikkan permintaan tenaga kerja.

Gagasan dan pemikiran Keynes selanjutnya dikembangkan oleh Harrod. Pola pendekatan Harrod terhadap proses pertumbuhan menunjukkan ciri pokok pada kerangka analisis Keynes. Perhatian Harrod terpusat pada pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara terus menerus dalam keadaan keseimbangan yang stabil. Dalam hubungan ini, Harrod (Sukirno, 2013) memaparkan dua konsep laju pertumbuhan yang menjadi gagasannya, yaitu (1) laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap memadai dari sudut pandang pengusaha/investor. Hal ini disebut sebagai *the warranted of growth*. Selain itu oleh Harrod juga menunjukkan adanya (2) *the rate of growth*, yang sifatnya berbeda dari *warranted rate*.

2.3. Teori Kemiskinan

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan terberat dalam proses pembangunan suatu negara. Oleh karenanya, agenda untuk mengatasi kemiskinan berkaitan dengan banyaknya faktor yang berhubungan dengan apa yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri. Menurut Kuncoro (2010), kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan perspektif analis. Cara pandang analis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat di atasi.

Masalah kemiskinan akan selalu muncul karena sifat dasar dari kemiskinan adalah relatif. Ketika suatu negara mengalami peningkatan taraf hidup, maka standar hidup akan berubah. Standar hidup masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan yang rendah, sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. Menurut Kuncoro (2010), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Berdasarkan konsep kemiskinan di atas, esensi utama dari kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Persoalan aksesibilitas menjadi penting karena kemiskinan akan menjadi lingkaran setan, dimana golongan miskin tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan ketika mereka tidak dapat meningkatkan sumber dayanya. Masyarakat miskin hidup dalam suatu lingkaran setan kemiskinan yang tak berujung. Dalam lingkaran setan kemiskinan, terdapat tiga poros yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu: 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, 3) rendahnya tingkat pendidikan.

Mengingat semakin kompleksnya persoalan kemiskinan, menjadikan konsep tentang kemiskinan telah mengalami perluasan. Kemiskinan tidak lagi dianggap sebagai dimensi ekonomi, namun meluas pada dimensi sosial. Menurut Todaro dan Smith (2015), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut: (1) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat; (2) Pendapatan perkapita masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat; (3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata; (4) Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut; (5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit; (6)

Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

2.4. Tinjauan Empiris

Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, paling tidak ada dua sektor yang menjadi fokus pengeluaran pemerintah yaitu pendidikan dan kesehatan. Alokasi pengeluaran pemerintah pada kedua sektor ini untuk mengatasi rendahnya kualitas pembangunan manusia (Hongyi-Li dan Liang, 2010; Shivaranjani, 2010; Astri dkk, 2013; Olulu, 2014). Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan efek multiplier bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Srinivasan, 2013; Gemmell dkk, 2012, Kessides, 1993; Mudaki dan Masaviru, 2012; Fan, 2000).

Sebagaimana telah dipaparkan di bagian awal, bahwa untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan. Instrumen kebijakan yang efektif mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud adalah melalui pengeluaran pemerintah. Adapun efektivitas pengeluaran pemerintah diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap kinerja pembangunan di telah banyak dikaji peneliti. Studi Abdullah dan Rusdarti (2017), Muhammed (2014), Olulu, dkk (2014), Srinivasan (2013), dan Alexiou (2009) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Ethiopia, Nigeria, India, dan negara maju di Eropa memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, penelitian Augustin (2010) di Asia, Eropa, Amerika dan Afrika menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor publik dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Di Indonesia, studi Yustie dan Heriqbaldi (2014) di Jawa Timur menemukan bahwa pengeluaran pemerintah/belanja modal memiliki pengaruh signifikan dengan penurunan kemiskinan.

Sebaliknya, studi Abu dan Abdullahi (2010) serta Mudaki dan Masaviru (2012) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor publik di Nigeria dan Kenya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, studi oleh Al-Shatti (2014) di Yordania menemukan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Widodo, dkk (2011) di Jawa Tengah menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa indikator makroekonomi (pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan) dan indikator keuangan (APBD) Pemerintah Provinsi di Indonesia. Data sekunder yang dipergunakan tersebut bersifat runtut waktu (*time series*) dari tahun anggaran 2014 s/d 2018.

Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi non perilaku, yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen APBD. Sampel penelitian mencakup 34 provinsi (*cross section*). Adapun konsep analisis data menggunakan data panel (*pooled data*). Data panel atau panel data adalah gabungan dari data runtut waktu dan data antar individu.

3.2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2014 sampai 2018.

Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda, dengan model estimasi sebagai berikut:

$$\text{Model Regresi 1: } Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

keterangan:

- Y_1 = Pertumbuhan ekonomi
- α = Konstanta
- X_1 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan
- X_2 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Infrastruktur
- $b_1; b_2$ = Koefisien regresi
- e = error/ tingkat kesalahan

$$\text{Model Regresi 2: } Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (2)$$

keterangan :

- Y_2 = Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)
- α = Konstanta
- X_1 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan
- X_2 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Infrastruktur
- $b_1; b_2$ = Koefisien regresi
- e = error/ tingkat kesalahan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel, untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2014-2018. Dengan menggunakan model regresi data panel, peneliti akan menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel independen dan variabel dependen.

4.1. Hasil Penelitian

Hasil pengujian variabel pengeluaran pemerintah provinsi pendidikan dan kesehatan (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pengujian variabel pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur

(X₂) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 1. Hasil Regresi Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan, serta untuk Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16,29406	3,348661	4,865844	0,0000
LOG(X1?)	-0,256871	0,448271	-0,573026	0,5674
LOG(X2?)	-1,593301	0,674787	-2,361190	0,0194

Sumber: Hasil Olahan, 2020

Hasil pengujian variabel pengeluaran pemerintah provinsi pendidikan dan kesehatan (X₁) terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil pengujian variabel pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur (X₂) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Regresi Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan, serta untuk Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dengan Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,408774	0,063166	6,471467	0,0000
LOG(X1?)	-0,009658	0,004674	-2,066222	0,0404
LOG(X2?)	0,002764	0,010601	0,260762	0,7946

Sumber: Hasil Olahan, 2020

4.2. Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Olulu (2014) bahwa secara keseluruhan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama juga ditunjukkan dari studi Lotto (2011) dan Al-Shatti (2014), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan studi Abu dan Abdullahi (2010), bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peranan pemerintah provinsi menjadi semakin besar seiring dengan semakin terkonsolidasinya pelaksanaan otonomi daerah. Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tercermin pada seberapa besar alokasi anggaran yang disediakan bagi penyediaan barang publik. Oleh karenanya, pengeluaran sektor publik ini tetap menjadi skala prioritas sebagai pemenuhan standar dan alokasi belanja untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah (*mandatory spending*).

Pada sisi lain, dukungan anggaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan merupakan wujud nyata dari investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan terus dipayakan relatif lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Alokasi anggaran sektor publik ini difokuskan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan termasuk peningkatan tenaga pendidikan dan kesehatan yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan memberi dampak secara langsung terhadap proses pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Al-Shatti (2014) dan Shivaranjani (2010) bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama juga ditunjukkan dari studi Gemmel, dkk (2012), yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Hal demikian mengindikasikan mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur diperlukan dalam mendukung proses pembangunan daerah/negara dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara makro, ketersediaan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Pada sisi lain, alokasi belanja pemerintah untuk infrastruktur memainkan peran strategis dalam meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak jarang pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dijumpai pada wilayah/daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang relatif memadai. Ini berarti bahwa ketersediaan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas daerah/wilayah. Untuk itu, diperlukan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas anggaran pemerintah untuk infrastruktur dalam upaya meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah di Indonesia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yustie dan Herigbaldi (2014) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan temuan Werner (2007) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dan mengurangi jumlah penganggur. Temuan yang sama juga ditunjukkan dari studi Agustin (2010), bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada sektor publik ternyata efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, sekaligus merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk peningkatan akses layanan publik yang semakin merata. Melalui pengeluaran pada kedua bidang tersebut, pemerintah membangun sarana prasarana dan sistem pendidikan dan kesehatan yang baik sebagai investasi jangka panjang

untuk meningkatkan produktivitas daerah, yang pada gilirannya akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan distribusi pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Widodo, dkk (2011) bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pada sisi lain, hasil penelitian ini justru bertolak belakang dengan temuan Augustin (2010) dan Werner (2007) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur, kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan dapat mengurangi kemiskinan.

Infrastruktur memiliki sifat eksternal positif yang tinggi, dikarenakan ketersediaan infrastruktur akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan dan perkembangan sektor ekonomi, meningkatkan produktivitas wilayah, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang. Infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan akseslerasi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong pembangunan suatu daerah/wilayah, karena semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakkan, semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur jelas mengakibatkan pemanfaatan potensi dan sumber daya ekonomi menjadi tidak optimal, bahkan sulit berkembang hingga ke taraf yang diharapkan. Kondisi demikian menuntut pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk membangun dan menyediakan infrastruktur.

5. SIMPULAN

Temuan yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam studi ini adalah bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk memfokuskan optimalisasi anggaran pada belanja urusan wajib (*mandatory spending*) dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Mengingat aktivitas ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, maka komposisi pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur secara terus menerus perlu ditingkatkan, dengan memperhatikan efek stimulusnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.A., Rusdarti. (2017). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Journal of Economic Education*. Vol. 6 (No.1).

- Abu, N. Abdullahi, U. (2010). Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis. *Business and Economics Journal*, Vol. 4.
- Augustin, K.F. (2010). Inequality, Income and Poverty: Comparative Global Evidence. *Social Science Quarterly. Southwestern Social Science Association*. United Nations University-Institute for Development Economic Research, Vol. 91, No. 5.
- Al-Shatti, A.S. (2014). The Impact of Public Expenditure on Economic Growth in Jordan. *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6, No. 10.
- Alexiou, C. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*, 11(1).
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YPKN.
- Berarzi, N., & Marzo, F. (2015). The Elasticity of Poverty with Respect to Sektoral Growth in Africa. *Jornal Wiley*, Vol. 63, No 1.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Dasar-dasar ekonometrika (basic econometrics, 5th ed.)* (Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangungsong, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.
- Ifa, A., Guetat, I. (2018). Does public expenditure on education promote Tunisian and Moroccan GDP per capita? ARDL approach. *The Journal of Finance and Data Science 4*.
- Juanda, B. (2009). *Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan*. Institut Pertanian Bogor (IPB) Press.
- Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan D. Guritno. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N.G (2012). *Macroeconomics*. Jakarta: Erlangga
- Muhammed, A. (2014). Government Spending for Economic Growth in Ethiopia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.5, No.9.
- Olulu, R.M, Erhieyovwe, E.K, Andrew, U. (2014). Government Expenditures and Economic Growth: The Nigerian Experience. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 5, No 10.
- Rosen, H.S. (2014). *Public Finance*, Tenth Edition, Global Edition, the McGraw-Hill Series in Economics.
- Shivaranjani, V. (2010). *Size and Composition of Government Expenditure in India: Impact on Economic Growth*; Madras School of Economics Anna University.
- Sukirno, S. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Shahril, K. (2011). The Association between Government Expenditure and Economic Growth in Malaysia. *Ritsumeikan Asia Pacific University*
- Srinivasan, P. (2013). Causality between Public Expenditure and Economic Growth: The Indian Case. *Journal of Economics and Management*, Vol. 7, No. 2.

- Todaro, M.P., Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. 12th Edition. United Kingdom: Pearson Addison Wesley.
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya (Dilengkapi Aplikasi Eviews)*. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.
- World Bank. (2001). *Indonesia, Constructing a New Strategy for Poverty Reduction*.
- World Bank. (2009). *Health and Growth. Commission on Growth and Development*, The International Bank for Reconstruction and Development Washington.
- Yustie, R., Heriqbaldi, U. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, Vol.24, No.1.